

Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Simpang Lima Pati

Studi Kasus: Pusat Kuliner Pati, Jawa Tengah

Andini Naelis Saadah¹

¹Jurusan Arsitektur, Universitas Islam Indonesia

¹Surel: 18512003@students.uui.ac.id

ABSTRAK: Relokasi Pedagang Kaki Lima memiliki dampak kelebihan dan kekurangan. Salah satu dari dampak kekurangan tersebut yaitu tempat relokasi menjadi sepi pengunjung dan pedagang mulai merugi. Berbagai strategi telah dicoba oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut namun tetap saja belum berhasil. Pada kasus ini Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perhutani diubah menjadi Pusat Kuliner. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi dalam menarik pengunjung ke Pusat Kuliner Pati. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pusat Kuliner Pati mengalami penurunan pemasukan karena kurangnya pengunjung yang datang ke tempat relokasi dengan berbagai faktor diantaranya akses jalan dan tata ruang Pusat Kuliner. Maka dari itu dapat dilakukan strategi untuk mengatasi minimnya pengunjung yang datang yaitu dengan mengadakan event-event di lokasi tersebut, menata perletakan pedagang sesuai dengan jenis barang yang dijual, mengubah atau menambah akses menuju Pusat Kuliner, dan atau merelokasi Pusat Kuliner ke kawasan yang lebih strategis.

Kata Kunci: pedagang kaki lima, pusat kuliner, relokasi

PENDAHULUAN

Penataan ulang Alun-alun Simpang Lima Pati yang selama ini dimanfaatkan pedagang sebagai tempat berjualan, bakal dialih fungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, bersantai, maupun berekreasi. Ahmad Faisal, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), mengungkapkan hal itu melalui jajarannya di Dinas Pertamanan Ariyanto Wibowo. Selanjutnya penataan Alun-alun dilaksanakan pada bulan April 2019 dan selesai pada Oktober 2019.



a. Sebelum revitalisasi



b. Saat revitalisasi

Gambar 1 Suasana Alun-Alun Pati

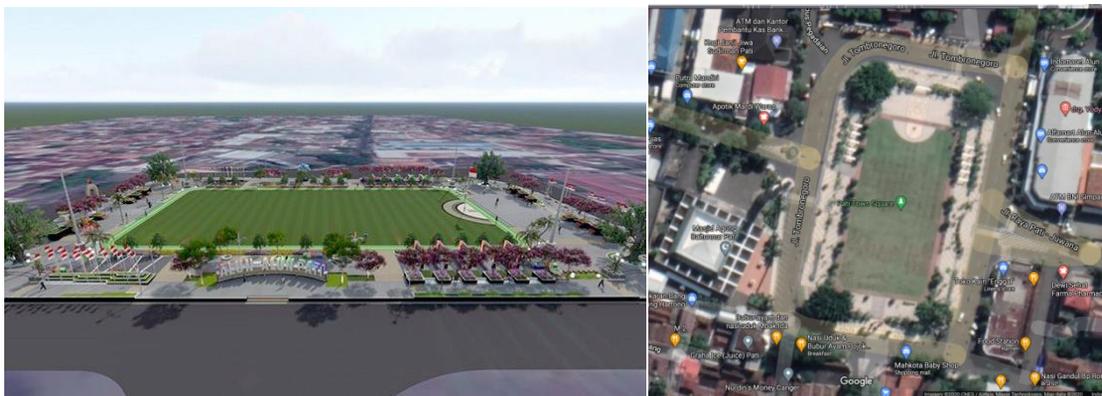
Sumber : Google Map, 2019

Revitalisasi Alun-alun merupakan tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menuntut daerah-daerah dalam perkotaan

memiliki proporsi ruang terbuka hijau minimal 20-30 persen. Menurut penjelasan Bupati Pati, untuk merevitalisasi Alun-Alun Pati cukup sulit karena harus merelokasi pedagang kaki lima (PKL) yang sudah lama berniaga di area Alun-alun itu. Sedangkan peraturan daerahnya melarang keberadaan pedagang kaki lima berjualan. Kemudian akhirnya para pedagang direlokasikan ke Tempat Penimbunan Kayu Perhutani, sekaligus disediakan anggaran untuk revitalisasi Alun-alun Pati.

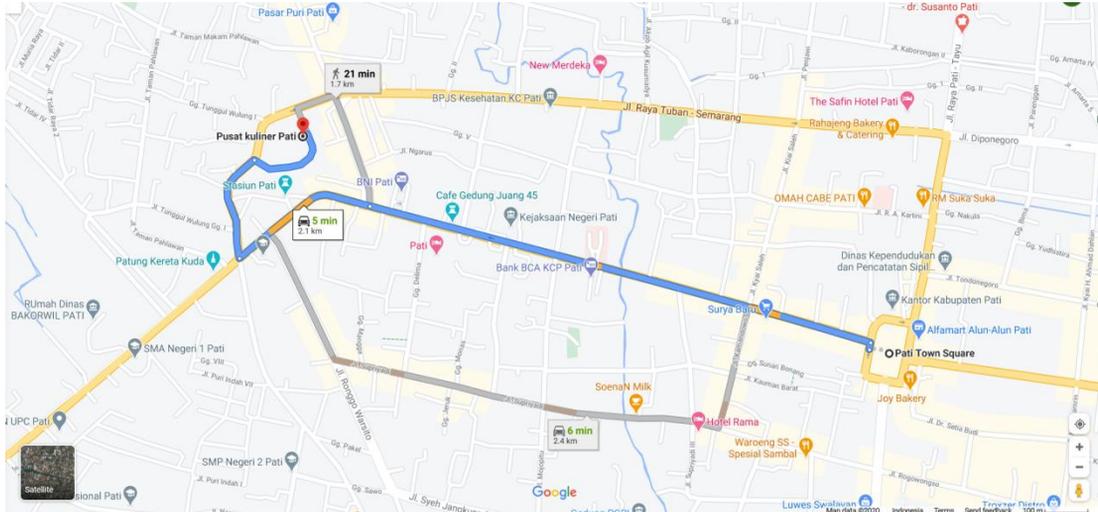


Gambar 2 Alun-Alun Sebelum Revitalisasi
Sumber : patikab.go.id, 2017



Gambar 3 Revitalisasi Alun-alun
Sumber : Jawa Pos, 2019

Bupati Pati, Haryanto, meyakinkan para pedagang bahwa di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perhutani memiliki fasilitas yang lebih lengkap daripada di Alun-alun. Di TPK Perhutani tempatnya lebih luas, disediakan tenda, toilet, dan lain-lain yang hingga saat ini masih terus diperbaiki dan dikembangkan. Selain itu, waktu berjualan di TPK Perhutani tidak dibatasi, tidak seperti di Alun-alun yang memiliki batasan waktu dalam berjualan. Bupati juga menegaskan bahwa Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perhutani yang menjadi tempat relokasi itu masih masuk dalam wilayah jantung kota, jaraknya yang tidak sampai 3 km dirasa masih mudah diakses oleh warga Pati.



Gambar 4 Jarak Pusat Kuliner Pati dan Alun-alun Pati
Sumber : Google Map, 2020

Kemudian Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Simpang Lima Pati diam-diam tertarik menjual dagangannya di Tempat Penimbunan Kayu Perhutani atau kini disebut Pusat Kuliner Pati. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah mulai bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah Perda No.13 Tahun 2014 tentang pembinaan PKL. Awalnya, pihak Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) hanya menerima 303 data dari hasil verifikasi sebelumnya. Lalu seorang pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengatakan: “Data saat ini telah berubah menjadi 315 individu, sehingga perubahan yang signifikan telah terjadi dalam waktu yang relatif singkat”.



Gambar 5 Pusat Kuliner Pati
Sumber : Google Map, 2020

Namun seiring berjalannya waktu, pedagang merasa dirugikan karena menurunnya pengunjung yang datang ke Pusat Kuliner Pati. Jualannya tidak laku, makanan-makanan yang tidak habis terjual pun dibagikan ke sesama pedagang, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk hengkang dari tempat itu. Dari ratusan pedagang

kaki lima Alun-alun Pati yang direlokasikan di Pusat Kuliner Pati, kini hanya tersisa puluhan pedagang saja yang masih berjualan disana. Mereka menilai tempat relokasi tersebut tidak layak karena berada di pinggiran kota dan akses jalan tidak mendukung. Meskipun acara-acara kabupaten kerap diadakan disana, Pusat Kuliner Pati sampai saat ini masih tetap sepi pengunjung.

Pada bulan Juli lalu, puluhan eks pedagang Alun-alun Simpang Lima Pati menyampaikan keluhan mereka ke DPRD Kabupaten Pati. Para pedagang menilai Pusat Kuliner Pati gagal menjadi pusat keramaian baru. Mereka berharap dapat kembali berjualan di Alun-alun atau jalanan, namun hal ini perlu adanya perubahan peraturan daerah. Selain dengan merelokasikan pedagang ke lokasi lain, pemerintah sampai saat ini masih mengevaluasi Pusat Kuliner Pati agar dapat menarik pengunjung lebih banyak lagi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana solusi agar jumlah pengunjung di tempat relokasi bisa sebanding ataupun lebih banyak dari tempat berjualan sebelumnya?

KAJIAN TEORI

Pengertian Relokasi

Menurut F. Davidson pada Lusiani (2008:14), faktor krusial pada perencanaan relokasi yaitu letak dan kualitas lokasi relokasi baru, karena hal tersebut yang merujuk pada hal-hal seperti kemudahan menuju ke lahan pekerjaan, bidang bisnis, kredit, jaringan sosial, dan peluang pasar. Sedangkan menurut Binsar M. Gulton pada Lusiani (2008:14) mengungkapkan bahwa secara umum tak jarang relokasi dimaknai sebagai pemindahan lokasi berdasarkan segi ruang geografis. Meski begitu, relokasi mencakup permasalahan antar beragam konsep ruang misalnya ruang sosial, ekonomi, politik, budaya, sampai ke ruang lingkungan hayati. Setiap lokasi memiliki peluang dan batas masing-masing. Dalam memilih lokasi akan lebih memungkinkan bila relokasi dan pemulihan pendapatan berhasil karena lokasi yang dipilih sama baiknya dengan tempat terdahulu dari segi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diperkotaan tak luput dari adanya kenyataan yang ada sebagai dampak eksekutif kebijakan pembangunan yang hanya bertumpu pada perkotaan dan tak merata hingga ke pedesaan. Akibatnya berdasarkan Loekman Sutrisno (1995 :163) terjadi apa yang dikenal menggunakan *run away urbanization* ditandai dengan terjadinya pengusiran penduduk dari desa ke kota dengan angan-angan akan memperoleh pekerjaan di kota yang lebih baik. Namun sesampainya di kota mereka kecewa lantaran tak menerima pekerjaan yang sesuai keinginan, akhirnya mereka melakukan pekerjaan apa saja, termasuk sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Keadaan pengangguran warga kota yang hadir menurut warga pendatang dan penduduk kota yang semakin bertambah dan tak semuanya bisa terserap dalam sektor formal, sebagai akibatnya terjadilah pengangguran yang melimpah. Ketika seorang pengangguran mencari jalan sendiri dengan cara terjun sebagai PKL wajib berhadapan

dalam fenomena ketidakpahaman perilaku pemerintah dan kelas pemilik kapital & warga urban yang tak begitu mau mengakui keberadaan mereka. Lantaran itu tak heran bila selanjutnya ada kebijakan pemerintah pada pemberdayaan PKL yang tak menguntungkan PKL (Absori, 2006).

Dampak Pedagang Kaki Lima

Dampak Fisik: Perubahan terjadi dalam elemen fisik kota misalnya trotoar, jalan, masa bangunan, taman, dan sirkulasi yang merupakan dampak dari adanya kegiatan pedagang kaki lima yang dilakukan dalam elemen-elemen fisik kota tersebut.

Dampak Lingkungan: Kumuh. Kondisi lokasi pedagang kaki lima (PKL) biasanya tak luput dari perkara kebersihan dan estetika lingkungan, dimana dalam aspek ini bisa mempunyai gambaran menurut lokasi bisnis tersebut; Kemacetan Lalu Lintas. Selain ditimbulkan oleh sang PKL kemacetan ditimbulkan pula oleh angkutan umum yang tak mematuhi peraturan lalu lintas, terutama pada depan pasar-pasar seperti menurunkan dan menaikkan penumpang secara sembarangan. Kemacetan yg terjadi membuahkan pencemaran udara yang berdampak dalam lingkungan yaitu menurunnya kualitas udara pada suatu wilayah (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2002); Trotoar Berubah Fungsi. Pada awalnya jalur pejalan kaki dibuat untuk menikmati suasana kota berubah fungsi sebagai lokasi untuk berjualan para PKL yang akhirnya memperburuk paras kota (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2002).

STUDI PRESEDEN

Pasar Klitikan, Surakarta

Pada tanggal 23 Juli 2006 kurang lebih sebanyak 1000 pedagang kaki lima serempak meninggalkan area Monumen Banjarsari atau Pasar Klitikan Banjarsari, menuju lokasi baru yaitu Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta, pasar yang baru saja dibangun Pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta dianugerahi penghargaan dari MURI atas prestasi yang spektakuler ini. Menurut Bibit Santoso dalam wawancara Okezone pada 16 Februari 2016, terdapat pedagang yang menempati kios sebanyak 1140 pedagang. Kemudian ditambah 500 pedagang yang berlokasi berhimpitan dengan kios. Untuk luas areanya sendiri mencapai 2 hektare.

Selain itu, menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta yang berada dibawah kepemimpinan Jokowi awalnya mempunyai program untuk memindahkan para pedagang Klitikan dari lokasi lama yaitu di kawasan Banjarsari, Solo, ke bekas lokalisasi yang ditutup. Saat itu para pedagang keberatan karena akses menuju lokasi tersebut sulit dijangkau. Penolakan juga berdasar tempat tersebut yang merupakan tempat bekas lokalisasi, sehingga dianggap kurang baik untuk mencari rezeki. Namun, karena Presiden Jokowi yang piawai bernegosiasi bersama para pedagang, ketika lokalisasi Silir telah ditutup, pada tahun 2004 Pasar Klitikan Notoharjo resmi beroperasi.

Pasar Klitikan Notoharjo yang memiliki dua lantai ini terbagi atas tiga blok. Blok pertama berada di lantai bawah khusus untuk para pedagang yang menjual barang elektronik. Dibagian atas blok tersebut khusus menjual barang-barang bekas. Blok kedua dikhususkan untuk berjualan sepatu hingga perlengkapan mobil. Sementara itu, di blok ketiga untuk menjual peralatan mobil.

Meskipun barang yang dijual bisa dibilang masih sama ketika berada di Pasar Klitihikan Banjarsari, yaitu mayoritas merupakan barang bekas/loak. Dilokasi baru kali ini para pedagang kaki lima pasar klitikan melakukan perubahan besar-besaran, dimulai dari cara mereka menata barang dagangan mereka, komunikasi mereka dengan pengunjung, hingga kewajiban mereka untuk patuh pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pasar tradisional.

Berbagai perubahan yang dilakukan mantan PKL ini patut diajungi jempol sehingga tak perlu waktu lama terhitung setelah hijrah, para mantan pedagang kaki lima ini relatif berhasil melakukan adaptasi. Baik adaptasi lingkungan maupun adaptasi tingkah laku. Meski demikian tetap saja harus ada pembenahan sana-sini demi terciptanya sebuah kondisi pasar yang ideal. Keadaan ini bisa dibuktikan dengan semakin banyaknya pengunjung yang berburu barang-barang bekas/loak di pasar ini.

Meski menyandang gelar sebagai Pasar Klitihikan yang identik dengan pasar barang bekas/loak, namun tidak sedikit barang yang dijajakan ada juga yang relatif up to date. Hal ini bisa saja terjadi sebagai upaya memberikan pelayanan yang lebih bagi pengunjung. Karena bisa jadi ada pengunjung yang memerlukan barang up to date itu untuk memenuhi kebutuhannya, baik untuk mengikuti perkembangan zaman/mode atau sekedar sebagai variasi saja. Sehingga Pasar Notoharjo sekarang menjadi lebih variatif ditinjau dari ragam/jenis dagangan yang dijajakan.

Sentra PKL Ex-China Gajah Mada

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat mendesak untuk menangani eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lingkungan Alun-alun kota ini segera, setidaknya karena terdapat tiga alasan. Alasan pertama lantaran PKL di lingkungan alun-alun kota ini berada tepat di depan Kantor Bupati yang semestinya sebagai sentral pemerintahan dan menjadi pujian rakyat Kabupaten Sidoarjo. Alasan yang kedua yaitu dengan membiarkan perkembangan PKL yang terus bertambah dikhawatirkan hal tersebut akan bisa menimbulkan preseden yang buruk bagi upaya penataan kota secara keseluruhan. Alasan ketiga, eksistensi Pedagang Kaki Lima jumlahnya sudah cukup banyak pada lingkungan alun-alun kota, hingga kemampuan untuk menampungnya telah melampaui ambang batas toleransi lokasi ini. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan segala upaya untuk mengatasi hal tersebut diantaranya yaitu untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di area sekitar Alun-alun menuju GOR Delta Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil dan pembahasan menurut penelitian Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Kabupaten Sidoarjo oleh Irma Arfiani R. (2012) dengan berdasarkan teori dari Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994:54-60) unit-unit pedampak, sehingga bisa disimpulkan bahwa menurut masing-masing dampak sebagai berikut: Untuk dampak individual, dampak dari aspek psikologi, ekonomi, dan sosial sudah muncul dalam kebijakan relokasi tersebut. Terutama aspek sosial, persaingan antar pedagang menjadi semakin ketat setelah direlokasi ke GOR Delta. Pada dampak organisasi, para anggota kelompok Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Bersatu ini memiliki kas paguyuban dan uangnya dapat disumbangkan untuk menjenguk pedagang yang sedang sakit, selain itu mereka merasa bahagia karena kas tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agustusan setiap tahunnya. Pada dampak masyarakat adalah dengan adanya relokasi tersebut mereka merasa senang. Karena

masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti berbelanja dengan mudah. Namun karena kurangnya fasilitas seperti gazebo untuk pengunjung, masyarakat mengeluh. Pada dampak Lembaga dan Sistem Sosial, dengan adanya kebijakan relokasi dari Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo mengakibatkan GOR Delta tampak tidak teratur. Banyak hal yang harus dibenahi yaitu masalah penerangan dan lampu.

RELOKASI PKL DI KECAMATAN BUDURAN, SIDOARJO

Pedagang kaki lima menggunakan bahu jalan di kawasan jembatan layang kecamatan Buduran untuk berdagang. Sehingga sering terjadi macet di ruas jalan serta menyebabkan pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut merasa terganggu. Selain itu tempat berjualan pedagang kaki lima juga menyebabkan lingkungan sekitar menjadi kumuh dan merusak estetika keindahan ruang terbuka hijau.

Tempat relokasi yang menarik perhatian pengunjung serta berlokasi cukup dekat dari tempat lama mereka berjualan, menjadikannya faktor pendukung relokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan jembatan layang Kecamatan Buduran. Pedagang kaki lima tidak dibebani sewa tempat atau bisa juga dibilang mendapatkan fasilitas secara gratis. parkir yang luas tersedia agar kendaraan tidak diparkir di bahu jalan dan pembeli yang datang akan merasa aman untuk memarkir kendaraannya. Sedangkan untuk faktor penghambat relokasi yaitu pemerintah menyediakan lahan yang masih terbatas dan bahkan hampir tidak ada. Hal ini terjadi karena anggaran untuk membeli lahan yang masih kurang, sehingga untuk merelokasi PKL masih belum ada solusinya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis preseden maka didapatkan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi sepi pengunjung di suatu pusat keramaian. Hal yang pertama yaitu mengatur perletakkan barang dagangan sesuai jenisnya. Yang kedua dengan mengadakan event-event tertentu yang diagendakan di lokasi untuk menarik pengunjung. Yang ketiga dengan penambahan akses menuju pusat kuliner yang aksesnya cukup sulit dijangkau. Selanjutnya yaitu melakukan relokasi ke tempat yang lebih layak dan berada di area jantung kota.

ANALISIS

Perubahan Perletakkan Pedagang

- Kelebihan: Pengunjung atau pembeli dapat dengan mudah mengunjungi lokasi pedagang yang menjual barang sesuai dengan keinginan pengunjung.
- Kelemahan: Perlu melakukan pemindahan letak pedagang kembali, dan pengunjung perlu mengingat kembali atau mencari lokasi pedagang yang menjual barang tersebut.
- Keuntungan: Tata ruang menjadi lebih rapi dan mudah diakses.
- Tantangan: Mengubah tata ruang Pusat Kuliner seefektif dan seefisien mungkin.

Perubahan Akses

- Kelebihan: Pengunjung lebih mudah untuk menjangkau pusat kuliner dari area dalam kota dan tidak perlu melalui jalan yang dilalui oleh kendaraan bermuatan berat.

- Kelemahan: Perlu melakukan renovasi atau pembongkaran pada Pasar Pujasera.
- Keuntungan: Dengan meningkatnya jumlah pengunjung maka akan meningkatkan jumlah pedagang yang berjualan disana.
- Tantangan: Mengubah tata ruang Pasar Pujasera menjadi satu dengan Pusat Kuliner Pati.



Jl. Tunggul Wulung kebanyakan dilewati kendaraan bermuatan berat

Jl. Kol. Sunandar ramai oleh kendaraan pribadi seperti mobil dan motor

Gambar 6 Skema Perubahan Akses Pusat Kuliner

Perubahan Lokasi Pusat Kuliner

- Kelebihan: Pusat kuliner mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat.
- Kelemahan: Perlu melakukan revitalisasi dan atau pembongkaran pada site baru apabila disana terdapat bangunannya.
- Keuntungan: Pengunjung dari segala arah dapat mengunjungi tempat tersebut dan tentu saja akan ramai oleh banyak orang.
- Tantangan: Harus mencari lokasi yang strategis agar banyak diketahui oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pusat Kuliner Pati mengalami dampak penurunan pemasukan karena kurangnya pengunjung yang datang ke tempat relokasi dengan berbagai faktor diantaranya akses jalan dan tata ruang Pusat Kuliner yang kurang teratur. Maka dari itu dapat dilakukan strategi untuk mengatasi minimnya pengunjung yang datang dengan mengadakan event-event di lokasi tersebut, menata perletakan pedagang sesuai dengan jenis barang yang dijual, mengubah atau menambah akses menuju Pusat Kuliner, dan atau merelokasi Pusat Kuliner ke kawasan yang lebih strategis.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Absori. (2006). *Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Perkotaan dengan Pendekatan Partisipatif (Studi Kasus di Kota Surakarta)*. Makalah Seminar, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fikry, Larasati, Sulandari. (___). *Manajemen Relokasi Pedagang Kaki Lima Taman Menteri Supeno di Kota Semarang*, 4-7 Purnamasari, Nerissa Arviana. (2012). *Strategi Komunikasi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Shelter Guyub Rukun Manahan Kota Surakarta*, 5-10
- Prasetya, M. A., & Fauziah, L. (2016). *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*. 147-148.

Situs Web

- Patikab.go.id (2019, 16 Januari). Akhirnya, Bupati Ungkapkan Alasan Relokasi PKL. Diakses pada 18 Oktober 2020 dari <https://www.patikab.go.id/v2/id/2019/01/16/akhirnya-bupati-ungkap-alasan-relokasi-pkl/>
- Patinews.com. (2019, 21 Januari). Akhir Februari 2019, Alun-Alun Simpang Lima Pati Mulai Direnovasi. Diakses pada 18 Oktober 2020 dari <https://www.patinews.com/akhir-februari-2019-alun-alun-simpang-lima-pati-mulai-direnovasi/>
- Radarkudus.jawapos.com. (2020, 11 Juli). Pusat Kuliner Sepi, PKL Curhat Ke Dewan. Diakses pada 19 Oktober 2020 dari <https://radarkudus.jawapos.com/read/2020/07/11/203625/pusat-kuliner-sepi-pkl-curhat-ke-dewan>